

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Penelitian Terdahulu

Hasil penelitian terdahulu merupakan hasil yang digunakan sebagai acuan dari peneliti dalam melakukan penelitiannya terutama hal - hal yang berkaitan dengan teori maupun metode penelitian yang digunakan. Selain keterkaitan teori dan metode, penelitian terdahulu dapat digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya persamaan dan perbedaan dari penelitian yang ada serta sebagai bahan referensi yang dapat digunakan untuk mengembangkan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti selanjutnya.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No.	Judul	Fokus Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Effendi, A. N, dkk (2021). <i>Analisis Good Governance Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) di Universitas Negeri Malang.</i>	Good Corporate Governance	Deskriptif Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi manajemen BOPTN yang ada di Universitas Negeri Malang harus lebih ditingkatkan dengan cara mensosialisasikan program BOPTN secara komprehensif kepada civitas akademika serta masyarakat.

2.	Julantika, Tutus, dkk (2017). <i>Akuntabilitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (Studi Kasus SDN Pringgowirawan 02 Jember)</i>	Akuntabilitas, Responsibility	Deskriptif Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan dana BOS dinilai dari jumlah yang direncanakan dengan jumlah yang digunakan. Ratio dalam penelitian ini kesesuaian dapat dilihat kemampuan sekolah dalam menggunakan dana BOS sesuai dengan yang sudah direncanakan di awal pembelajaran.
3.	Rosalina, Amirah (2018). <i>Implementasi Good Governance dalam Pengelolaan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2016 (Studi Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pamekasan).</i>	Good Corporate Governance	Deskripsi Kuantitatif	Hasil penelitian menunjukkan dalam pengelolaan pendapatan asli daerah tahun anggaran 2016, khususnya di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pamekasan tidak terlaksana secara maksimal dengan 3 sudut pandang prinsip, prinsip eektivitas dan efisiensi, prinsip akuntabilitas dan prinsip transparansi.
4.	Dasor, Yohanes Wendelinus (2018). <i>Implementasi Good Governance Dalam Manajemen Berbasis Sekolah.</i>	Good Corporate Governance	Deskriptif Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Good Governance kaitannya sangat erat dalam koordinasi dan kerjasama diantara <i>stakeholders</i> pendidikan di sekolah. Suatu kebijakan

				publik di sekolah tidak bisa terelakkan dari tuntutan untuk mengimplementasikan suatu praktek <i>good governance</i> .
5.	Wibowo, Wahyudi, dkk (2015). <i>Implementing Good Corporate Governance in Indonesia A Strategic Approach</i> .	Good Corporate Governance	Deskriptif Kualitatif	Perusahaan ASGR berhasil mengembangkan model GCG terbaiknya dan mengimplementasikannya dengan menggunakan kerangka pendekatan sistem yang telah disajikan pada bagian pembahasan. Berdasarkan model tersebut, perusahaan dapat diuntungkan dari penerapan GCG sebagai bagian dari strategi perusahaan. Dengan kata lain, GCG mempunyai peran strategis terhadap manfaat dan kelangsungan hidup perusahaan dalam jangka panjang.

Persamaan dengan penelitian terdahulu yakni membahas pengelolaan Dana BOS dan Prinsip - prinsip *Good Corporate Governance* di sekolah sebagai fokus penelitian dan pada penelitian terdahulu dengan penelitian ini sama - sama menggunakan penelitian deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data yang

menggunakan wawancara, observasi serta dokumentasi. Pada penelitian yang akan dilakukan nanti akan dilengkapi dengan Analisis Model Interaktif.

Perbedaannya hanya sedikit antara penelitian terdahulu dan penelitian yang akan dilakukan yakni penelitian terdahulu hanya menyebutkan salah satu prinsip dari *Good Corporate Governance*.

## **2.2 Tinjauan Teori**

### **2.2.1 *Good Corporate Governance***

#### **2.2.1.1 Pengertian *Good Corporate Governance***

Istilah *Good Corporate Governance* secara umum merupakan sistem pengendalian dan pengaturan perusahaan yang dapat dilihat dari mekanisme hubungan antara berbagai pihak yang mengurus perusahaan, maupun ditinjau dari “nilai – nilai” yang terkandung dari mekanisme pengelolaan itu sendiri. *Corporate Governance* yakni rangkaian proses yang terstruktur untuk mengelola serta mengarahkan suatu bisnis atau usaha - usaha korporasi dengan tujuan untuk meningkatkan nilai - nilai perusahaan serta kontinuitas usaha.

#### **2.2.1.2 Prinsip – Prinsip *Good Corporate Governance***

Perlunya menerapkan prinsip - prinsip *Good Corporate Governance* terdapat banyak alasan, salah satu alasan utama yang dikemukakan oleh para pakar ialah bahwa prinsip - prinsip *Good Corporate Governance* diperlukan untuk mengatasi masalah yang ada dalam pengelolaan perusahaan. Banyak hal yang harus diperbaiki dalam *Corporate Governance*, seperti pembentukan komite audit, peningkatan transparansi informasi, keberadaan komisaris independen, dan meningkatkan hubungan dengan investor. Menurut Gudono (2017:143) teori keagenan

(*Agency Theory*) beban yang muncul karena tindakan manajemen tersebut menjadi *agency costs*. *Agency costs* adalah merupakan biaya yang terjadi manakala solusi organisasi adalah yang dipilih, dengan kata lain aspek kemungkinan bahwa manajemen bisa sengaja mengeksploitasi keunggulan informasi yang dimilikinya untuk keuntungan mereka sendiri.

Tidak hanya perusahaan atau usaha - usaha korporasi, pada bidang pendidikan juga membutuhkan penerapan prinsip - prinsip *Good Corporate Governance*. Untuk instansi pendidikan khususnya sekolah, implementasi yang dibutuhkan yakni *Good School Governance*. *Good School Governance* adalah sebuah perangkat pendukung untuk membentuk sebuah sekolah dengan tata kelola yang baik. Salah satu hal yang memerlukan penerapan prinsip *Good School Governance* yakni dalam pengelolaan keuangan sekolah. (Susanti, 2019)

Komponen yang menjadi landasan tata kelola suatu perusahaan atau instansi lain dapat disebut baik yakni prinsip - prinsip *Good School Governance* atau *Good Corporate Governance*. Prinsip - prinsip utama *Good School Governance* atau *Good Corporate Governance* yang harus dijalankan dalam manajemen berbasis sekolah (Dasor, 2018), antara lain :

1. Partisipasi

Dalam bidang pendidikan partisipasi berhubungan erat dengan keterlibatan elemen - elemen penunjang pendidikan. Obyek sasaran dari suatu kebijakan yang diputuskan, nilai partisipasi tidak hanya memperlakukan *stakeholders* tetapi menjadi salah satu pelaku atau subjek utama. Keterlibatan pihak sekolah, masyarakat dan pemerintah dibutuhkan dalam pengambilan kebijakan publik tidak hanya menghasilkan kebijakan yang tepat sasaran pada kebutuhan masyarakat, namun juga membuat masyarakat ikut bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kebijakan itu. Sebagai penunjang pendidikan, setiap elemen memiliki tugas dan tanggungjawab masing - masing yang bertujuan mewujudkan pendidikan yang bermutu.

## 2. Keterbukaan (*Transparancy*)

Adanya keterbukaan dan kemudahan akses bagi seluruh *stakeholders* dalam proses pengambilan kebijakan publik pendidikan, khususnya dalam penggunaan sumber daya yang berkaitan dengan publik pendidikan merupakan syarat pelaksanaan manajemen berbasis sekolah yang baik. Keterbukaan merupakan salah satu aspek dalam terwujudnya pelaksanaan manajemen berbasis sekolah. Tujuan dari keterbukaan ini membangun rasa saling percaya antara *stakeholders* pendidikan.

Dengan adanya keterbukaan memberikan jaminan kepada masyarakat mendapatkan informasi kebijakan sehingga memudahkan masyarakat dan *stakeholders* melaksanakan kontrol. Dalam manajemen berbasis sekolah, keterbukaan atau *transparancy* dilihat pada tiga aspek, yaitu : 1) adanya kebijakan terbuka terhadap pengawasan, 2) adanya akses informasi sehingga masyarakat dapat menjangkau setiap segi kebijakan dalam pendidikan, 3) berlakunya prinsip *check and balance* antar *stakeholders* pendidikan.

### 3. Daya Tanggap (*Responsivitas*)

Kemampuan pimpinan lembaga pendidik bertujuan untuk mengenali kebutuhan, menyusun agenda dan prioritas, dan mengembangkan program - program yang sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan siswa atau anak didik merupakan penjelasan dari daya tanggap atau *responsivitas*. Daya tanggap menunjuk pada keselarasan atau kesesuaian antara program dan kegiatan dengan kebutuhan peserta didik.

### 4. Akuntabilitas (*Accountability*)

Akuntabilitas merupakan kemampuan untuk mempertanggungjawabkan semua tindakan dan kebijaksanaan yang telah ditempuh. Pengadaan laporan pertanggungjawaban yang jelas, efektif dan terukur merupakan salah satu bentuk

perwujudan implementasi *Good Governance* yang bertujuan agar tata kelola pemerintahan atau instansi berhasil dan dapat dipertanggungjawabkan. (Iflaha, 2019)

Akuntabilitas adalah tanggung jawab pembuat keputusan yaitu lembaga *stakeholders* dan pihak penyelenggara pendidikan publik (masyarakat). Pelaksanaan tugas atau kinerja selama dalam proses penyelenggaraan pendidikan berkaitan erat dengan tanggung jawab.

Pertanggungjawaban tersebut sebagai bentuk *check and balance* yang siap digugat oleh masyarakat. Untuk menciptakan sistem mengontrol dan memonitor kinerja agar tercipta efisiensi dan efektivitas serta kualitas kinerja yang diharapkan akuntabilitas dapat diterapkan dalam manajemen berbasis sekolah. Prinsip akuntabilitas sebagai salah satu ciri *good governance* dapat tercipta dalam lingkungan lembaga pendidikan dengan membangun sistem mengontrol dan monitoring.

##### 5. Keadilan (*Equity*)

Kekuatan kepemimpinan tim sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan manajemen berbasis sekolah. Setiap pihak dalam penyelenggaraan pendidikan memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan merupakan keadilan dalam pelaksanaan manajemen berbasis sekolah. Kualitas pelayanan

pendidikan juga didapatkan, keadilan tidak hanya mengharuskan pemerintah menjamin masyarakat untuk memperoleh akses sama pada pelayanan pendidikan.

## **2.2.2 Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)**

### **2.2.2.1 Pengertian Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)**

Menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler Pasal 1 bahwa dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah dana yang digunakan terutama untuk menandai belanja nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar dan menengah sebagai pelaksana program wajib belajar dan dapat dimungkinkan untuk menandai beberapa kegiatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang diberikan pemerintah, digunakan untuk penyediaan pendanaan biaya operasional bagi satuan pendidikan. Selain itu, pemerintah berharap semua lapisan masyarakat dapat mengikuti pendidikan tanpa perlu memikirkan biaya pendidikan dan dapat memenuhi kebutuhan para siswa tanpa adanya pungutan untuk orang tua. (Julantika et al., 2017).

### **2.2.2.2 Tujuan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)**

Menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler

pasal 15 bahwa penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler untuk pengadaan barang dan/jasa dilaksanakan melalui mekanisme pengadaan barang dan/jasa di sekolah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan mengenai pengadaan barang/jasa oleh satuan pendidikan. Sekolah menggunakan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk membiayai operasional penyelenggara pendidikan di sekolah meliputi banyak komponen.

#### **2.2.2.3 Sasaran Bantuan Operasional Sekolah (BOS)**

Sekolah penerima Dana Bantuan Operasional Sekolah terdiri dari : SD, SDLB, SMP, SMPLB, SMA, SMALB, SLB dan SMK berikut menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler pasal 3. Pendistribusian dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) ke setiap sekolah dalam periode triwulan oleh pemerintah. Namun, tidak pada wilayah terpencil, akses wilayah yang sulit dan membutuhkan tambahan biaya yang lebih mahal, maka dari itu pencairan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk sekolah di wilayah - wilayah tersebut dilaksanakan setiap satu semester atau enam bulan.

Kepala sekolah memegang kendali dalam pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Dalam pendistribusian dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) masih mengalami kendala, seperti tidak tepat waktunya pendistribusian dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang disebabkan oleh beberapa faktor. Sekolah harus mampu mengelola dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk mendukung kegiatan belajar mengajar yang berkualitas. (Wirakusuma et al., 2017)

### **2.2.3 Sekolah Luar Biasa (SLB)**

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar pasal 1 yaitu wajib belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga negara Indonesia atas tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah. Pendidikan mempunyai tugas penting dalam menyiapkan sumber daya manusia untuk pembangunan sesuai dengan tuntutan zaman (Daroni et al., 2018). Manajemen pendidikan adalah sebuah proses yang dilaksanakan secara sadar dan terencana untuk menciptakan suasana belajar dan proses pembelajaran serta mencapai tujuan pendidikan. Tidak hanya pada sekolah reguler saja, semua satuan pendidikan di Indonesia harus memiliki manajemen pendidikan yang baik, tidak terkecuali Sekolah Luar Biasa (SLB). Manajemen pendidikan pada Sekolah Luar Biasa (SLB) tidak sama dengan sekolah reguler pada

umumnya, biasa disebut dengan manajemen pendidikan khusus yaitu manajemen sekolah bagi anak berkebutuhan khusus.

Anak - anak yang menyandang kecacatan tertentu (*disable children*) baik secara mental, fisik dan emosional disebut dengan Anak Berkebutuhan Khusus (ABK). Anak berkebutuhan khusus terbagi menjadi beberapa jenis ketunaan, antara lain : tunanetra, tunadaksa, tunarungu, tunagrahita, tunalaras dan autis. Keadaan siswa yang khusus atau unik membutuhkan penanganan yang berbeda dengan siswa reguler, begitu pula dengan manajemen pendidikannya. (Daroni et al., 2018)

### **2.3 Kerangka Konseptual**

Untuk menjadi sekolah yang maju biasanya ditentukan oleh berbagai faktor, mulai dari sarana dan prasarana yang lengkap, fasilitas yang memadai, tenaga pendidik yang handal dan manajemen atau pengelolaan keuangan yang baik. Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) merupakan salah satu sumber keuangan sekolah dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Masalah yang sering dialami *stakeholder* di setiap sekolah mengenai pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yakni kurangnya partisipasi, keterbukaan, daya tanggap, akuntabilitas dan keadilan pihak sekolah dalam mengelola sumber keuangan, kurangnya keterlibatan *stakeholder* dalam mengawasi pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

